



HENDRA HIDAYAT, S.Pd.I.

(Wakil Sekretaris PC LP Ma'arif NU Kab. Sumedang , WK. Bidang Organisasi dan Kaderisasi PAC. GP. Ansor Kec. Cisarua, Dosen Pilsafat Ilmu dan Pilsafat Ilmu Pendidikan Islam di STAI UNSAP Unit Asyrofuddin, dan Mahasiswa Magister PAI di UNINUS Bandung).

Mengabdikan NU, Membangun Negeri (Studi tentang Islam, Budaya Lokal dan Organisasi Transnasional Islam)

Ancaman Radikalisme, Terrorisme Dan Tantangan Organisasi Transnasional Islam

Dewasa ini Muslim dengan ras atau etnik Melayu merupakan komunitas Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu wajar bila Muslim di kawasan ini menjadi tumpuan harapan bagi kebangkitan Islam di seluruh dunia. Harapan itu muncul karena selama ini Muslim Melayu dikenal sebagai Muslim moderat, akomodatif yakni mengakomodir berbagai macam budaya atau tradisi namun juga terbuka terhadap perubahan yang datang dari luar sepanjang perubahan itu membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi mereka. Sesuai dengan watak bahasa Melayu, Islam Melayu juga lebih berwatak egaliter. Islam Melayu kemudian tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan budaya Melayu. Inilah yang menjadikan Islam dan Melayu seolah menyatu atau sulit dipisahkan sehingga menjadi Melayu berarti menjadi Muslim.¹

Namun dewasa ini, Islam Melayu dengan karakteristik yang telah disebutkan di atas tengah menghadapi ancaman dari gerakan radikalisme dan terorisme yang membawa simbol atau bahasa agama. Islam Melayu juga tengah menghadapi tantangan dari gerakan transnasional Islam yang cenderung anti terhadap tradisi dan budaya lokal. Gerakan-gerakan itu tentu akan menjadi ancaman bagi kelangsungan Islam Melayu dengan karakter yang disebutkan di atas. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan strategi untuk menangkalkan ancaman maupun tantangan dari gerakan radikal maupun transnasional tersebut.

Apa itu radikalisme ?

Menurut The Sage's English Dictionary and Thesaurus, radicalism adalah : *The political orientation of those who favor revolutionary change in government and society.* (Orientasi politik dari kelompok yang mendukung perubahan masyarakat dan pemerintahan secara revolusioner). Kalau dihubungkan dengan Islam atau radikalisme Islam artinya kelompok yang menjadikan Islam sebagai orientasi politik guna mendukung perubahan revolusioner di pemerintahan maupun di masyarakat. Bila dihubungkan dengan konteks Indonesia, menurut hemat saya, kelompok yang berusaha mencapai tujuannya dengan cara-cara kekerasan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku di Indonesia juga bisa disebut

¹ Di Malaysia penyatuan antara Islam dan Melayu kemudian diformalkan dalam konstitusi. Pasal 160 ayat(2) menyatakan bahwa semua etnis Melayu adalah Muslim. Paper disampaikan dalam International Conference on Islam in Malay World (ICON IMAD) III dengan tema : "Islam Yang Berkemajuan ; Capaian ,Tantangan dan Strategi ke Depan) yang diselenggarakan atas kerjasama Program Pascasarjana UIN SGD Bandung dengan Akademi Pengajian Islam Universitas Malaysia (APIUM), Malaysia pada tanggal 29-30 Oktober 2013 di Bali World Hotel, Bandung.

radikal. Dengan pengertian seperti ini, gerakan yang ingin mendirikan Negara Islam sebagai ganti bagi Negara Pancasila bisa disebut gerakan radikal. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) juga bisa dikategorikan radikal sepanjang mereka bermaksud merubah atau menggantikan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dengan system khilafah **teokratik**. FPI (Front Pembela Islam) juga bisa disebut radikal sepanjang mereka menggunakan cara-cara kekerasan, pengrusakan dan main hakim sendiri untuk melakukan perubahan di masyarakat.

Apa itu terorisme?

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.²

Terorisme menjadi berita aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang dikenal sebagai "September Kelabu", yang memakan 3000 korban. Di Indonesia, terorisme menjadi populer setelah terjadinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang dikenal dengan tragedy bomb Bali ke satu yang menimbulkan korban sipil dengan menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang.

Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (*Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism*), dimana konvensi ini mengartikan terorisme sebagai *Crimes against State*.

Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *Crimes against State* (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi *Crimes against Humanity*, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil.³

Menurut pasal 14 ayat 1 *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984*, terorisme didefinisikan sebagai berikut: "*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.*"⁴ Sehingga oleh Mulyana W.Kusumah dikatakan bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*)⁵

Dalam buku yang diterbitkan secara online oleh AMCRAN (Australian Muslim Civil Rights Advocay Network) disebutkan bahwa suatu aksi bisa dikategorikan sebagai suatu 'aksi teroris' menurut undang-undang Australia bila pelakunya mempunyai maksud untuk memaksa atau mempengaruhi masyarakat umum atau pemerintah dengan intimidasi (gertakan). Juga harus ada maksud untuk meyebar-luaskan suatu alasan politik, agama atau ideologi. Dan orang itu juga harus melakukan, atau mengancam akan melakukan, salah satu di bawah ini: 1) mengakibatkan cedera fisik yang parah atau kematian pada seseorang; 2)

² (Source :<http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme> diakses 03 Februari 2016)

³ (Indriyanto Seno Adji, "Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hal. 50.).

⁴ Loebby Loqman, Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hal. 98

⁵ (Mulyana W. Kusumah, Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 22.)

mengakibatkan kerusakan berat pada harta milik; 3) membahayakan hidup orang lain; 4) menciptakan risiko kesehatan atau keamanan; 5) atau secara serius mencampuri, mengganggu, atau merusak prasarana, seperti sistem telepon atau jaringan listrik⁶.

Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Tahapan yang dilalui seseorang sebelum menjadi radikal atau terroris

Moh.Yasir Alimi dalam tulisannya : *Staircase of terrorism and deradicalization strategies*⁷ menyebutkan ada lima tangga sebelum seseorang benar –benar menjadi pelaku terror. Tangga pertama adalah menebarkan kebencian dan kekerasan agama. Dengan kata lain agama dijadikan alat untuk menebarkan kebencian dan kekerasan. Tangga kedua, *takfiryah*, pengkafiran dan pemurtadan bagi sesama Muslim disertai dengan jastifikasi untuk merampas hidup atau harta benda mereka. Bahkan terkadang disertai dengan suatu pernyataan bahwa masjid yang digunakan oleh kelompok yang dianggap musuh boleh dihancurkan. Tangga ketiga ditandai dengan upaya untuk melakukan penelitian dan pengujian terhadap kelompok lain sambil mengusung jargon “kewajiban menegakkan hukum Tuhan”, menganggap rezim yang ada sebagai jahiliyah (*jahiliyah-ization*). Tangga keempat dan tangga kelima, ditempati oleh mereka yang sudah dipersiapkan sebagai pelaku langsung tindakan terror berikut para fasilitatornya. Menurut Yasir Alimi, program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih terbatas pada mereka yang sudah berada ditangga empat dan lima, dengan mengabaikan mereka yang tinggal di tangga di bawahnya padahal mereka sesungguhnya juga ikut berkontribusi bagi perkembangan terorisme.

Secara sosiologis, keterlibatan Muslim sebagai terrorist bisa melalui berbagai tangga/ tahapan pergaulan sosial. Tahap pertama, sejumlah individu memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka adalah korban dari ketidakadilan. Mereka kemudian mencoba mencari solusi. Pada saat solusi tidak didapatkan mereka mencoba naik ke tahapan atau tangga berikutnya. Pada tahap kedua, mereka mencoba mengidentifikasi factor eksternal yang dinilai bertanggung jawab atas ketidakadilan yang mereka hadapi. Mereka yakin bahwa factor eksternal itu memiliki agenda untuk menghancurkan mereka secara sistematis. Kesimpulan ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, mereka adalah orang-orang jelek (*bad people*), oleh karenanya penggunaan kekerasan terhadap mereka bisa dibenarkan (*justified*). Kedua mereka kemudian diberi label sebagai “evil” (setan) yang berarti menempatkan mereka sebagai *subhumans* (bukan lagi manusia). Mereka yang berkumpul di tangga kedua ini kemudian berbaur dengan mereka yang memiliki perasan sama. Mereka kemudian mengarahkan kemarahannya terhadap musuh bersama. Pada tahap ketiga,

⁶ (<http://amcran.org>)

⁷ Moh.Yasir Alimi dalam tulisannya : *Staircase of terrorism and deradicalization strategies* ,The Jakarta Post, 29 September 2011

muncullah ikatan moral kelompok (*group's moral bond*). Mereka mendiskusikan bagaimana mempersiapkan mental dan fisik sebelum terlibat dalam aktifitas kekerasan fisik terhadap musuh. Diskusi ini dilakukan secara sembunyi. Pimpinan terus menekankan pentingnya loyalitas terhadap organisasi dan berusaha mengisolasi diri dari masyarakat. Proses rekrutmen sesungguhnya terjadi pada tangga atau tahapan keempat. Di sini terrorist membagi dunia menjadi dua bagian yang saling bertentangan yakni mereka versus kami. Mereka hanya mengenal orang yang berada di selnya tidak mengenal sel lain. Pada tahap kelima, anggota yang terpilih dilatih untuk melaksanakan serangan terror. Di sini tidak ada lagi kesempatan untuk turun kembali ke tangga yang lebih rendah. Mereka menerima perlakuan spesial dari pimpinannya.

Secara sosiologis, ada kemiripan antara gerakan kaum teroris dengan gerakan mereka yang menganut ideology *totalitarian*⁸ di Barat seperti *fascism* dan *komunisme*. Kemiripan itu bisa dilihat dari tiga sisi. Pertama, keduanya menggunakan bahasa pengawal, pembela/pelindung/kaum revolusioner untuk mendefinisikan dirinya dan menggunakan bahasa kaum imperialis, kapitalis, kolonialis untuk menyebut musuhnya. Kedua, keduanya sama-sama menggunakan kekerasan tanpa pandang bulu. Pada dasarnya tidak berbeda cara pembunuhan yang dilakukan oleh Adolf Hitler dan Bin Laden. Ketiga, keduanya sama-sama mengagungkan kematian. Jose Millan Astray, seorang jendral pro Nazi mengeksploitasi konsep *Viva la Muerta*, atau "*Long live death*," sementara bin Laden mengeksploitasi konsep *syahid* atau *martyrdom*.⁹

Itulah sebabnya Ahmad Najib Burhani dalam tulisannya yang berjudul "Globalized and localized terrorism." menolak agama dimasukkan sebagai faktor pemicu terorisme. Pendorong terorisme menurutnya bukan agama tapi ideology. *Religion the cause of terrorism? If ideology could powerfully inspire people to do anything, including violence, can we say that religion is the cause of terrorism? My answer is no.....In the context of terrorism, religion gives this atrocity an aura of sacredness or divinity. However, just like in Germany under the Nazis, the root and cause of terrorism is not religion.*¹⁰

Dalam konteks Indonesia, gerakan politik kelompok Islam radikal juga menyerupai gerakan politik komunisme. Oleh karena itu sebenarnya amat disayangkan bila umat Islam tidak berusaha mengenal, mempelajari atau mendiskusikan ideology totalitarian yang biasa digunakan gerakan komunisme. Paul Suparno, dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta dalam tulisannya yang berjudul *Critical thinking education protects us from radicalism*, mengatakan : *In the old days, we were always afraid to analyze some radical groups or the ideologies that were contrary to Indonesian ideology. For example, we were not allowed to teach and discuss communist ideology. I think the method is not right, because if students do not know them, they will easily be attracted; but if they know exactly the movement with some negative effect, they will become more critical.*¹¹ (Di masa lalu, kita selalu takut untuk

⁸ Sebagai lawan dari sistem demokrasi, sistem totalitarian adalah bentuk pemerintahan dari suatu negara yang bukan hanya selalu berusaha menguasai segala aspek ekonomi dan politik masyarakat, tetapi juga selalu berusaha menentukan nilai-nilai 'baik' dan 'buruk' dari perilaku, kepercayaan dan paham dari masyarakat. Sebagai akibatnya, tak ada lagi batas pemisah antara hak dan kewajiban oleh negara dan oleh masyarakat. Di dalam sistem totalitarian, bukan negara yang melayani masyarakat, tetapi sebaliknya sebanyak mungkin anggota masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah, diwajibkan melaksanakan berbagai tugas untuk membantu penguasa membangun negara ke arah bentuk ideal. Misalnya diwajibkan menjadi anggota satu-satunya partai politik atau satu-satunya serikat buruh bentukan pemerintah. Apabila nilai-nilai komunis (atau nilai-nilai suatu agama) dianggap oleh penguasa sebagai bentuk ideal, maka nilai tersebut akan didoktrinkan ke dalam pola pikir masyarakat.

⁹ Munajat, *Debunking myths of terrorism*, The Jakarta Post, September 8, 2009

¹⁰ Lihat : Ahmad Najib Burhani, "Globalized and localized terrorism", The Jakarta Post, June 8, 2010

¹¹ Paul Suparno, dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta dalam tulisannya yang berjudul *Critical thinking education protects us from radicalism*, The Jakarta Post, June 4, 2011)

menganalisa sejumlah kelompok radikal yang berlawanan dengan ideology Indonesia. Contohnya, kita tidak dibolehkan untuk mengajarkan dan mendiskusikan ideology komunis. Saya pikir, metode seperti ini tidak benar sebab siswa tidak memahami mereka, mereka akan mudah tertarik. Tetapi jika mereka tahu persis gerakan ini berikut efek negatifnya mereka akan menjadi lebih kritis.)

Mengingat komunisme dianggap sebagai ideology terlarang di Indonesia dan untuk sekian lama ideology ini dilarang dipelajari di Indonesia, maka generasi muda Islam banyak yang tanpa disadari terperangkap mengikuti cara-cara komunis, yang diberi label atau symbol Islam.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa gerakan radikal yang berpotensi menjadi teroris memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dari aspek teologis, mereka cenderung menggunakan teology kebencian dan melabeli sesama Muslim sebagai kafir, (*Takfiryah*). *Takfiryah* kemudian disusul dengan *tahlilyah* (penghalalan darah sesama muslim). *Takfiryah* biasanya terkait dengan tindakan yang dianggap sebagai dosa besar, atau tindakan lain yang dianggapnya sebagai “berhukum tidak dengan hukum Tuhan” sehingga si pelaku telah *kafir* atau *musyrik*. Apabila ada satu kelompok Islam yang gemar melakukan pengkafiran terhadap kelompok Muslim lain yang dalam cara beragamanya berbeda dengan kelompok pertama, maka hal ini bisa dijadikan indikasi bahwa kelompok ini (pertama) memiliki potensi menjadi radikal atau bahkan menjadi teroris. Tingkat radikalisisasi semakin meningkat pada saat *takfiryah* dibarengi dengan *tahlilyah* penghalalan darah orang yang dilabeli kafir. Dalam sejarah Islam, kelompok semacam ini dikenal sebagai kelompok Khawarij. Sebelum mereka berhasil membunuh Ali r.a., mereka membuat label terlebih dahulu bahwa Ali r.a. itu telah kafir.

Bila dilihat dari aspek sosial politik, mereka menyerupai rezim totalitarian yang anti terhadap demokrasi. Rejim totalitarian menurut Park Sang-seek, professor pada program Pasca Sarjana tentang Studi Perdamaian di Universitas Kyung Hee, Korea Selatan, memiliki ciri atau karakter antara lain sebagai berikut. Politisasi terhadap seluruh masyarakat sehingga warga Negara tidak bisa menikmati *privacy* dan kebebasan sipil yang mendasar karena mereka terus menerus berada dalam pengawasan aparaturnya Negara. Negara juga selalu melakukan cuci otak (*brainwashing*) terhadap rakyatnya melalui propaganda dan indoktrinasi.¹²

Dimana posisi agama ?

Menurut pendapat saya, meskipun agama sering diguakan sebagai tameng oleh gerakan radikal dan teroris, agama itu sendiri sebenarnya bukan factor (utama) yang memicu munculnya radikalisme dan terorisme. Sebab agama sebenarnya menjadi sumber kebaikan dan kedamaian dan pemanusiaan manusia. Saya sependapat dengan Afif Muhammad dan Johan Effendi yang menyatakan bahwa ketika agama berlawanan dengan karakter dasar agama tersebut berarti agama telah terkontaminasi oleh kepentingan lain dari luar agama seperti kepentingan ekonomi dan politik¹³. Oleh karena itu radikalisme dan terorisme, terlepas dari symbol agama apapun yang mereka gunakan, pada dasarnya merupakan musuh bersama umat beragama. Terror itu sendiri pada dasarnya tidak ada

¹² *Kim regime: Absolute monarchy or totalitarian regime? By Park Sang-seek in Seoul/The Korea Herald | ANN – Thu, Dec 29, 2011* Website: <http://sg.news.yahoo.com/opinion-kim-regime-absolute-monarchy-totalitarian-regime-041003443.html> . Diakses 1 January 2012 ,Republished by The Jakarta Post on December 31,2011

¹³ Sumber :[3]Afif Muhammad tentang “KerukunanBeragama pada Era Globalisasi”, pada *Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati Bandung ke-29*, tanggal 8 April 1997, Bandung, hlm. 1.)Lihat juga Johan Effendi, “Dialog AntarUmat Beragama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan”, dalam *Prisma*, No.5, Juni 1978. (Jakarta: LP3ES), hlm. 13.

hubungannya dengan agama. Saya sependapat dengan Din Syamsudin saat beliau mengatakan bahwa terorisme tidak memiliki akar dalam agama dan semua aksi terror pada dasarnya bukan tindakan keagamaan. Islam, misalnya, sangat keras, dalam mengecam terorisme sebagaimana dikatakan dalam kitab suci al-Qur'an : Barangsiapa membunuh seseorang tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan, maka ia seakan-akan membunuh seluruh umat manusia."(QS 5:32)

Islam, budaya lokal dan transnasional Islam

Transnational menurut bahasa artinya *involving or operating in several nations or nationalities* (melibatkan atau beroperasi di sejumlah Negara atau bangsa). Kalau dilihat dari sisi bahasa, Islam sejak awal memiliki karakter transnational. Transnational Islam baru menjadi masalah manakala ia secara paksa mau menghilangkan atau anti terhadap budaya dan tradisi lokal yang oleh masyarakat setempat dipandang baik. Memang tidak semua budaya atau tradisi lokal bisa dinilai baik, tetapi para pakar dalam Islam sebenarnya sudah lama memiliki criteria untuk menilai budaya atau tradisi yang masih pantas dilanjutkan serta budaya atau tradisi yang sudah tidak layak lagi dipertahankan.

Abu Hapsin dalam tulisannya yang berjudul: "Islam dan Budaya Lokal; Ketegangan antara Problem Pendekatan dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa"¹⁴, mengatakan bahwa kebijakan lokal (*local wisdom*) merupakan hasil dari proses dialog antara universalitas dan Islam dan budaya lokal. Dalam keadaan demikian Islam dihadirkan dalam bentuk substansinya sementara wadah (*form*)nya bisa saja menggunakan pranata sosial yang berlaku di masyarakat setempat. Inilah yang dimaksud dengan Islam *inclusive*, yaitu Islam yang terbuka untuk memasukkan (*include*) berbagai unsur dari budaya di luar Islam (asing) dan kemudian menjadikannya sebagai bagian dari tradisi Islam. Untuk menghindari sinkretisme, dalam proses asimilasi budaya tersebut tentu saja harus dilakukan pemilahan terlebih dahulu unsur-unsur yang bersifat substantif dari unsur-unsur yang bersifat formal. Atau, mana yang menjadi "isi" dan mana yang menjadi "wadah". "Wadah" atau *form* nya diterima menjadi bagian dari tradisi Islam, sementara "isi" nya di tolak. Hal seperti inilah yang banyak dilakukan oleh al-Qur'an dan Nabi Muhamad saw. saat menghadapi budaya Arab pra-Islam, hingga para penyebar Islam di tanah Jawa saat menghadapi tradisi lokal Jawa.

Senada dengan Abu Hapsin, Amin Abdullah, mantan rector Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, juga menekankan perlunya mengembangkan Islam yang lebih inklusif. Dalam tulisannya yang berjudul: "Religious Diversity and Islamic Education in Indonesia" beliau antara lain mensinyalir adanya pesantren yang masih mempertahankan pandangan exclusive-nya terutama pesantren yang disusupi paham Wahabi, dengan mengatakan : "*It should be noted, however, that not all pesantren have developed an inclusive point of view toward non-Muslims. Some of them, mainly the pesantren under the influences of the Wahhabis of Saudi Arabia and connected to ideological Salafis, have tended to develop exclusive perspectives.*"¹⁵

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya tidak anti terhadap budaya "luar" apakah budaya itu datang dari Barat atau dari local. Kalangan umat Islam Indonesia, khususnya yang memiliki afiliasi dengan organisasi masa Nahdlatul Ulama,

¹⁴ Makalah disampaikan dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke 10 di Banjarmasin pada tanggal 1-3 November pada tahun 2010.

¹⁵ <http://aminabd.wordpress.com/2010/06/01/religious-diversity-and-islamic-education-in-indonesia/> Diakses 3 Februari 2016

mengenal jargon: *al-mukhafadzah 'ala al qadim al-shalih wa al-ahdzu bi al-jadid al-ashlah*. Dengan asumsi bahwa Islam sejak zaman Nabi sampai kini akan terus melakukan proses dialog dengan budaya maka budaya Barat atau budaya local sebenarnya bisa di "islam" kan melalui proses modifikasi dan transformasi.

Penutup

Islam Melayu yang tersebar di Asia Tenggara, sebenarnya merupakan representasi kekuatan Islam moderat dengan jumlah terbesar di dunia. Untuk itu Islam Melayu berpotensi menjadi kiblat bagi Islam di dunia bila mereka bersama-sama terus membangun saling pengertian, memupuk silaturahmi dan persaudaraan serta mau bekerjasama dalam menciptakan kawasan yang aman dan damai sehingga benih-benih radikalisme dan terorisme bisa ditangkal dan diatasi secara bersama-sama sejak dini. Globalisasi memang telah memunculkan tantangan dan peluang bagi agama-agama termasuk Islam. Sementara globalisasi telah memberi ruang bagi munculnya perilaku agama yang ekstrim yang menciptakan kekerasan dan terror, ia juga bisa digunakan oleh para pemuka agama untuk mempromosikan etika yang membawa perdamaian dunia.

Kelompok radikal, terrorist dan transnasional Islam atau salafy radikal selalu menentang cara-cara demokratis dalam mengatur kehidupan bersama. Sebagai gantinya, mereka mengusung Negara totalitarian yang diberi label Islam. Oleh karena itu dukungan yang kongkrit terhadap proses demokratisasi yang ada di Indonesia maupun Malaysia akan sangat membantu dalam menekan kelompok radikal. Sebab prinsip demokrasi mengajarkan masyarakat untuk bermusyawarah atau bernegosiasi dalam mengatur wilayah publik. Prinsip demokrasi mengajarkan masyarakat untuk bisa menerima hanya sebagian dari apa yang diinginkannya. Prinsip demokrasi mengajarkan masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia. Prinsip demokrasi mengajarkan masyarakat untuk hidup sesuai *rule of law*. Prinsip demokrasi mengajarkan masyarakat untuk menyelesaikan konflik politik tanpa kekerasan, bebas menentukan pilihan hidup sesuai dengan hati nuraninya dan toleran terhadap perbedaan.